

Analisis Pemulihan Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia Pascapenyadapan Tahun 2013

Ikhsan Yovi Maulana¹, Zulkifli Harza², Bima Jon Nanda³

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹ikhsanyovimaulana15@gmail.com, ²zharza@soc.unand.ac.id, ³bimajonnanda@soc.unand.ac.id

Abstrak

This study aims to analyze the factors that prompted Indonesia to normalize bilateral relations between Indonesia and Australia after the 2013 wiretapping. Australia's wiretapping was revealed in 2013, Indonesia responded by withdrawing the country's diplomatic representatives and temporarily suspending economic, political and security relations. Indonesia wanted clarification and an apology from Australia, but the Australian government refused to do so. Australia's action was criticized by Indonesia because it was considered to have underestimated Indonesia. Even though the apology was not fulfilled, Indonesia has taken more aggressive normalization steps. The factors that encourage Indonesia to normalize bilateral relations with Australia will be examined using the concept put forward by Ethan Zawatsky and Ashley Gemma, namely normalization which has four factors, namely political turnover, economic interest, interest groups, and public sentiment. This study uses a descriptive methodology with a qualitative approach. The researcher found that of the four factors driving normalization, there were two indicators that were fulfilled to drive Indonesia to normalize bilateral relations between Indonesia and Australia after wiretapping in 2013, namely economic interest and public sentiment.

Keywords: Australia, Bilateral Relations, Indonesia, Normalization, Wiretapping

Received

Revised

Published

Pendahuluan

Hubungan negara Indonesia dan Australia bersifat fluktuatif seiring dengan keadaan politik yang sedang terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan secara signifikan, kadang harmonis namun juga bisa memburuk. Hal ini dipengaruhi oleh sentimen kedua negara yang ingin mencapai kepentingan nasional dan letak geostrategis dari kedua negara yang saling bersebelahan namun memiliki budaya yang sangat berbeda. Di lain sisi, faktor kedekatan Australia dengan Amerika Serikat dalam politik dan pertahanan juga menimbulkan permasalahan baru bagi hubungan bilateral Indonesia dan

Australia. Dalam kancah internasional, National Security Agency (NSA) atau Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat melakukan penyadapan terhadap jutaan data komunikasi pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia. Aksi penyadapan tersebut bekerja sama dengan Defence Signals Directorate (DSD) atau Direktorat Sandi Pertahanan Australia dalam memata-matai Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2007 di Bali. Tindakan ini untuk mengetahui bagaimana struktur jaringan komunikasi pertahanan Indonesia (Shaffan, 2018). Selanjutnya pada tahun 2009, Australia melakukan penyadapan melalui telepon genggam para pejabat di Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 20 Negara (G20) di London.

Aksi penyadapan terkuak pada tahun 2013, ketika seorang mantan kontraktor NSA, Edward Joseph Snowden, membongkar penyadapan yang dilakukan DSD terhadap SBY. Snowden secara sengaja membocorkan dokumen rahasia NSA. Dokumen tersebut memuat nama sejumlah pejabat di Indonesia yang menjadi target penyadapan. Merespons pemberitaan tersebut, Australia menganggap bahwa penyadapan merupakan hal yang lazim dilakukan negara sehingga tidak ada keharusan untuk meminta maaf dan klarifikasi. Sesuai dengan perkataan Abbott yaitu *“Australia should not be expected to apologize for the steps we take to protect our country now or in the past”*.

Sedangkan Indonesia merespons kasus penyadapan yang dilakukan Australia dengan tegas. Presiden menginstruksikan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphath Kusuma, pulang ke Jakarta. Selanjutnya meminta keterangan kepada Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, terkait penyadapan. Masyarakat Indonesia berkumpul dan berunjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Australia di Jakarta dan menyuarakan keinginan agar Australia melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada Indonesia.

Dilansir dari pidato Presiden SBY pada 20 November 2013, Indonesia menyatakan kekecewaannya terhadap Australia mengenai penyadapan dan meminta adanya penjelasan serta sikap resmi dari Australia. Indonesia

melakukan tiga langkah awal dalam merespons tindakan penyadapan. Pertama, Indonesia meminta klarifikasi dan kejelasan sikap resmi dari Australia. Kedua, pemerintah Indonesia melakukan protes dengan menghentikan dan mengkaji ulang sejumlah kerja sama bilateral untuk sementara waktu sampai adanya kejelasan dan keyakinan tidak ada penyadapan bagi garda pengembalian kepentingan negara. Sesuai dengan instruksi presiden, Kementerian Pertahanan Indonesia memutuskan setidaknya tiga kerja sama di bidang militer dan politik, yakni pergantian informasi intelijen tentang pencegahan aksi terorisme, kerja sama patroli laut dalam menangani imigran yang mencari suaka ke Australia, serta latihan militer Indonesia dan Australia. Selain itu, pemerintah juga mengkaji ulang kerja sama ekonomi, yang semula kerja sama impor-ekspor sapi berbasis negara atau *country based system* menjadi *zone based system*. Hal ini supaya Indonesia tidak terikat pada satu negara eksportir dan terjadi perluasan jaringan impor. Ketiga, dibutuhkan *COC* agar tak terjadi kejadian serupa di masa depan. Pidato tersebut juga menjelaskan harapan Indonesia untuk tetap berhubungan baik dengan Australia seiring dengan perkataan SBY yaitu “*Saya masih berharap, kita (Indonesia dan Australia) masih bisa menjalin hubungan dan kerja sama yang baik setelah kita mengatasi masalah (penyadapan) ini*”.

Meskipun Indonesia menunjukkan sikap kekecewaannya terkait aksi penyadapan yang dilakukan Australia dan Indonesia sebagai negara yang memutuskan sejumlah hubungan kerja sama, namun Indonesia yang terlebih dahulu menghubungi Australia pascaterbongkarnya penyadapan yang dilakukan Australia. Presiden SBY melayangkan surat resmi kepada Perdana Menteri (PM) Tony Abbott agar dapat mengklarifikasi dan memberikan kejelasan terhadap Indonesia. Australia menganggap bahwa tidak diperlukannya klarifikasi tersebut. Akan tetapi, Australia memberikan tiga substansi untuk menjaga hubungan bilateral negara. Pertama, Pemerintah Australia menyatakan keinginan untuk terus menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral dengan Indonesia yang berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang. Kedua, PM Australia berkomitmen untuk tidak akan melakukan tindakan yang akan mengganggu dan

merugikan Indonesia di masa depan. Ketiga, PM Australia menyetujui dan mendukung usulan Indonesia dalam menata kembali kerja sama bilateral, seperti pertukaran intelijen yang mengacu kepada protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan dipatuhi.

Indonesia menindaklanjuti surat balasan Abbott dengan enam respons. Pertama, presiden akan menugasi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam terkait isu-isu yang sensitif, berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia pascapenyadapan. Kedua, setelah terjadi *mutual understanding* dan *mutual agreement* kedua belah pihak, presiden berharap ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik kerja sama kedua negara secara lengkap. Ketiga, presiden akan memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik tersebut. Keempat, setelah protokol dan kode etik itu disahkan, presiden ingin pengesahannya bersama dengan Perdana Menteri Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia. Kelima, tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode etik itu dipenuhi dan dijalankan dengan melakukan observasi dan evaluasi. Terakhir, setelah kedua negara, terutama Indonesia, pulih kembali kepercayaan dan kemudian protokol serta kode etik itu benar-benar dilaksanakan, maka SBY memandang bahwa kerja sama bilateral yang jelas membawa manfaat bersama maka dapat dilanjutkan, termasuk kerja sama militer dan kepolisian kedua negara.

Usulan Indonesia tersebut disetujui oleh Australia dengan mengirim Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, pada 5 Desember 2013 untuk menormalisasikan hubungan bilateral negara dan membahas tentang instruksi presiden untuk mengkaji ulang kerja sama dalam berbagai bidang. Setelah Australia menyanggupi hal tersebut, Indonesia pada akhir bulan Mei 2014 memutuskan untuk kembali mengirim duta besar ke pos di Canberra yang sempat kosong semenjak November 2013 dan pada tanggal 4 Juni 2014 Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menemui Presiden SBY di Batam. Meskipun sampai memulihnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia tidak

ada pernyataan permintaan maaf secara resmi dari Australia seperti yang diharapkan, layaknya permintaan maaf Barack Obama terhadap Angela Merkel sebab diketahui telah menyadap telepon seorang kanselir Jerman, bahkan dari parlemen Australia juga mendesak Abbott untuk dapat menyelesaikan ketegangan dengan Indonesia dengan permintaan maaf dan pendekatan pribadi juga tidak diikuti oleh Abbott, namun hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia memulih yang ditandai dengan adanya pertemuan perwakilan negara untuk membahas kerja sama yang lebih efektif. Salah satu upaya signifikan dalam normalisasi dari Indonesia adalah kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Australia pada bulan Agustus. Selanjutnya pada 28 Agustus 2014, Julie Bishop bersama Marty Natalegawa mewakili kedua negara menyepakati dan menandatangani memorandum kode etik komunikasi internasional kedua negara yang bernama *Joint Understanding on a Code of Conduct between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation (The Lombok Treaty)* yang disaksikan oleh Presiden SBY di Nusa Dua, Bali. SBY juga mengatakan bahwa dengan adanya penandatanganan ini diharapkan kerja sama antara Indonesia dan Australia di bidang pertahanan dapat lebih didasari etika bersama dan tujuan untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai tanpa melanggar etika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong Indonesia menormalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013.

Metode

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian dengan mengumpulkan data dari sumber ilmiah dan subjek penelitian apa yang memiliki sifat deskriptif-analitis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis karena akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia menormalisasi hubungan bilateral dengan Australia

pascapenyadapan tahun 2013 yang didapatkan melalui sumber yang dapat dipercaya. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan menetapkan penelitian ini dilakukan pada kurun waktu 2013-2014. Tahun 2013 karena tahun tersebut penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia terkuak media massa sedangkan tahun 2014 adalah pada tahun inilah terjadinya penandatanganan *COC* terkait penyadapan sehingga ini mengisyaratkan adanya pemulihan hubungan bilateral kedua negara, yang disertai dengan dimulainya kembalinya hubungan kerja sama yang sempat terputus.

Tinjauan Kepustakaan

Normalisasi menurut Barston adalah proses dalam mewujudkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengakhiri sebuah konflik melalui berbagai cara seperti negosiasi, perjanjian damai, gencatan senjata, dan atau membangun hubungan diplomatik. Normalisasi juga dipandang sebagai proses yang melibatkan pengakuan akan kebutuhan tindakan untuk mengurangi ketegangan atau gesekan, dan proses menemukan resolusi seluruhnya maupun sebagian dari sumber utama perselisihan atau ketegangan.

Berdasarkan pemikiran Ethan Zawatsky dan Ashley Gemma tentang normalisasi, mereka mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya proses normalisasi antarnegara, di antaranya yaitu, *political turnover, economic interests, other special interest groups, and public sentiment* (Zawatsky, 2015). Indonesia yang semula menghentikan dan mengkaji ulang beberapa hubungan kerja sama mengharapkan normalisasi hubungan bilateral pascapenyadapan tahun 2013 meskipun tuntutan yang diberikan ke Australia tidak terpenuhi dan kecewa terhadap respons Australia dalam menyikapi kasus penyadapannya. Sehingga tindakan tersebut akan dianalisis menggunakan faktor pendorong normalisasi:

1. Political Turnover

Political turnover atau pergantian politik merupakan faktor pertama yang membuat suatu negara melakukan normalisasi hubungan diplomatik

maupun kerja sama dengan negara lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil kebijakan yang diambil oleh negara karena arah politik yang dianut oleh pemimpin negara tersebut. Pergantian politik dapat terjadi ketika sistem yang lama dianggap tidak lagi relevan dalam menyikapi permasalahan domestik maupun internasional. Pergantian politik diartikan sebagai pergantian pemimpin suatu negara. Dengan adanya pemimpin suatu negara dapat membentuk atau memulihkan hubungan bilateral negara, namun juga ada pemimpin yang malah memperkeruh hubungan negara bahkan memutuskan hubungan diplomatik. Sehingga pergantian pemimpin di suatu negara sangat menentukan bagaimana hubungan bilateral negara dengan negara lainnya.

2. *Economic Interest*

Economic interest atau kepentingan ekonomi juga menjadi faktor yang mendorong suatu negara dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik atau kerja sama negara. Keuntungan ekonomi tentu akan menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan keputusan bagi para *decision maker*. Kepentingan ekonomi dipercayai sebagai salah satu faktor negara melakukan normalisasi hubungan bilateral negara. Kepentingan ekonomi dapat terbentuk ketika suatu negara terdesak adanya faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara, maupun terdapat suatu hal yang menguntungkan negara apabila melakukan normalisasi dengan negara tertentu.

3. *Interest Group*

Interest group atau kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki visi misi yang sama atau tujuan yang sama, lalu mengorganisasikan diri dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Kelompok kepentingan berupaya untuk mempengaruhi keputusan politik dengan cara meyakinkan pejabat publik untuk selaras dengan kepentingan kelompok tersebut. Hal ini menurut Zawatsky dan Gemma dapat menjadi faktor yang mendorong negara melakukan normalisasi. Kelompok kepentingan ini dapat menjadi kontributor dalam proses normalisasi negara, kelompok ini biasanya berasal dari kelompok kepentingan

bisnis, kelompok oposisi, maupun kelompok yang membantu dalam pendanaan normalisasi.

4. *Public Sentiment*

Public sentiment atau sentimen masyarakat merupakan nilai-nilai yang dianut dan berkembang dalam masyarakat yang menimbulkan pemahaman atau persepsi oleh masyarakat. Sentimen publik dapat menjadi pertimbangan bagi proses perumusan kebijakan karena desakan masyarakat. Sentimen masyarakat ini dapat diperoleh dalam bentuk sebuah polling, survei, maupun hal lainnya. Sentimen masyarakat tersebut dapat mendorong terjadi proses normalisasi apabila sentimen masyarakat yang terkolektif adalah keinginan dalam melakukan normalisasi.

Hasil dan Pembahasan

Pergantian Pemerintahan di Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan Presiden Indonesia yang ke-6 dan menjabat selama dua periode yang mana periode pertama yaitu pada tahun 2004-2009 sedangkan periode kedua adalah 2009-2014. Melalui kedua periode tersebut, Indonesia dengan motto “Thousand Friends, Zero Enemy” menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan kebijakan Indonesia. Presiden SBY selama masa jabatannya juga berfokus kepada peningkatan ekonomi. Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Dilansir dari pidato kenegaraan Presiden SBY dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 69 pada tahun 2014 di Gedung MPR/DPR/DPD, SBY mengatakan bahwa secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9 %, yang mana ini melampaui pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang dalam kurun waktu yang sama. Selain hal demikian, Indonesia juga memiliki anggaran pembangunan sebanyak Rp. 1.842,5 triliun, cadangan devisa Indonesia sebesar US\$110,5 miliar, dan Indonesia juga tergabung dalam forum kerja sama

multilateral yang merepresentasikan lebih dari 60 % populasi bumi, 75 % perdagangan global, dan 80 % PDB dunia yaitu G20.

Peningkatan demi peningkatan yang diraih oleh Indonesia pada masa SBY ternyata membuat negara Australia penasaran terhadap Indonesia, sehingga melakukan penyadapan telepon genggam SBY pada saat menghadiri pertemuan G20 pada tahun 2009. Peristiwa tersebut akhirnya pada November 2013 dan terus berdinamika seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan Presiden SBY pada 20 Oktober 2014, dan kemudian digantikan oleh Presiden Joko Widodo. Pengangkatan Presiden Joko Widodo tersebut dihadiri oleh Tony Abbott, hal ini seiring dengan normalisasi yang dilakukan oleh Australia setelah terkuaknya penyadapan pada tahun 2013.

Normalisasi yang dilakukan Indonesia dan Australia pascapenyadapan tahun 2013 memanglah berdekatan dengan waktu berakhirnya jabatan Presiden SBY yang digantikan oleh Presiden Joko Widodo, namun faktanya penandatanganan kode etik yang menandai dilanjutkan kembali kerja sama yang sempat terputus sementara tersebut telah dilakukan pada 28 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh kedua Menteri Luar Negeri kedua negara yang disaksikan langsung Presiden SBY. Adanya penandatanganan tersebut juga sebagai bentuk awal dalam melanjutkan kerja sama antara Indonesia dan Australia semenjak pemberhentian beberapa kerja sama setelah terkuaknya kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Beberapa kerja sama tersebut di antaranya yaitu kerja sama keamanan, intelijen dan pertukaran informasi. Selain hal tersebut, pengiriman kembali Duta Besar Indonesia telah sebelumnya dilakukan oleh Indonesia pada bulan Mei 2014. Dengan demikian, daftar nama pejabat yang disadap, terkuaknya penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Respons Indonesia terhadap penyadapan, serta tiga langkah utama yang dilakukan Indonesia dalam rangka normalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Australia pascapenyadapan tahun 2013 terjadi saat Presiden SBY masih menjabat sebagai presiden dan dilaksanakan sebelum terjadinya pergantian presiden yaitu pada bulan Oktober.

Kepentingan Ekonomi Indonesia dalam Melakukan Normalisasi Hubungan Bilateral Dengan Australia Pascapenyadapan Tahun 2013

Pada tahun 2014, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Australia merupakan negara terbesar ke-delapan dalam ekspor nonmigas Indonesia. Sedangkan dari segi impor, Australia merupakan negara terbesar ke-sepuluh bagi Indonesia dalam mengimpor komoditas nonmigas. Hal ini menunjukkan pentingnya hubungan dengan Australia bagi Indonesia. Berdasarkan dokumen Australia Agency for International Development (AusAID) yang menyatakan bahwa hubungan bilateral yang telah dibangun Indonesia dengan Australia memberikan keuntungan dalam berbagai bidang seperti, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan infrastruktur dan tata kelola perekonomian negara, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kemampuan dalam memastikan keselamatan serta keamanan transportasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam bidang kesehatan dan pendidikan serta membantu dalam masalah lingkungan hidup termasuk bencana alam, selain itu juga membantu Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman kejahatan lintas negara. Australia juga mendukung demokrasi, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, Australia merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Hubungan ekonomi Indonesia dan Australia terjalin melalui *Free Trade Agreement* (FTA) antara ASEAN dengan Australia dan New Zealand menjadikan landasan dalam meningkatkan dan penajaman hubungan bilateral perdagangan antara Indonesia dan Australia dalam kerangka FTA bilateral. FTA bilateral Indonesia-Australia akan meningkatkan investasi dan peluang kerja sama perdagangan kedua negara, baik melalui pembukaan pasar potensial Indonesia dan Australia, maupun peningkatan proyek kerja sama ekonomi. Dari sisi perdagangan dan investasi Indonesia dan Australia terjadi peningkatan dan penajaman, hal ini dikarenakan keberadaan FTA sebagai komplementaritas kedua negara serta posisi geografis yang bertetangga. Selain melalui FTA

tersebut, hubungan Indonesia dan Australia juga terjalin dalam kerja sama Economic Partnership agreement pada tahun 2010.

Hubungan ekonomi perdagangan Indonesia dan Australia yang terjalin melalui persetujuan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) menjadi dasar hubungan Indonesia dan Australia, terutama dalam peningkatan perdagangan, ekonomi dan investasi. Melalui persetujuan tersebut, Australia dapat mengekspor barang ke Indonesia dengan bebas bea masuk dari sebesar 56% menjadi 92%, dari seluruh jenis komoditas barang yang diekspor Australia ke Indonesia, sedangkan 5% lainnya akan mendapatkan tarif bea masuk tidak lebih dari 5%. Bagi Indonesia, 99% ekspornya ke Australia akan bebas bea masuk, dan akan menjadi 100% bebas bea masuk pada saat perjanjian secara penuh diimplementasikan. AANZFTA ini mencakup barang, jasa, investasi dan kekayaan intelektual (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2012).

Indonesia dan Australia banyak bekerja sama dalam ekonomi dan perdagangan. Berikut neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia. Neraca perdagangan ini berfungsi sebagai dasar dalam menganalisis kepentingan ekonomi Indonesia dalam menormalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Australia pascapenyadapan tahun 2013.

Tabel 2. 1 Neraca perdagangan Indonesia-Australia tahun 2013-2014
(Dalam Juta USD)

No.	Uraian	2013	2014
1.	Ekspor	4.370	5.033
	Migas	1.397	1.337
	Non Migas	2.973	3.697
2.	Impor	5.038	5.648
	Migas	209	157
	Non Migas	4.829	5.491
3.	Neraca Perdagangan	-668	-614
	Migas	1.189	1.180
	Non Migas	-1856	-1.794

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia terhadap Australia mengalami kenaikan pada dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar US\$663 Juta sedangkan impor juga mengalami kenaikan sebesar US\$610 Juta. Adapun komoditas dari impor tersebut akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

KOMODITAS/PRODUK	NILAI : JUTA USD								Perub. % 15/14	Trend (%) 10-14	Pangsa (%) 10-15
	2010	2011	2012	2013	2014	JANUARI - SEPTEMBER					
						2014	2015				
TOTAL IMPOR	4.099	5.177	5.298	5.038	5.648	4.213	3.609	(14,3)	6,3	100,0	
Gandum dan meslin.	909	1.386	1.428	1.364	1.254	982	962	(2,1)	6,5	26,7	
Unclassified Primary commodities	460	341	302	354	701	493	396	(19,7)	9,2	11,0	
Raw sugar, refined sugar, lactosa, glukosa, fruktosa	106	219	147	349	400	313	292	(6,9)	36,8	8,1	
BATUBARA	-	0	0	70	257	184	183	(0,8)	-	5,1	
Bahan Kimia Anorganik (amonia, chlorides, soda api, sulfat, dll)	213	248	253	226	218	164	162	(1,0)	(0,5)	4,5	
Bijih & konsentrat besi	1	2	1	36	181	132	142	7,3	297,8	3,9	
DAIRY PRODUCT (susu, mentega, telur)	139	194	149	167	206	155	122	(21,5)	6,5	3,4	
DAGING SAPI SEGAR/BEKU	158	148	103	161	264	194	113	(41,6)	11,7	3,1	
Unclassified Primary Industries	122	152	192	205	191	142	111	(21,5)	12,8	3,1	
TEMBAGA	141	225	253	71	112	81	99	21,7	(14,8)	2,7	
ALUMINIUM	168	294	272	248	132	101	87	(13,2)	(6,3)	2,4	
Buah segar	19	21	30	46	49	46	59	28,4	30,5	1,6	
PUPIK MINERAL/KIMIA LAINNYA	136	130	70	39	43	31	44	43,1	(29,5)	1,2	
Bijih & konsentrat tembaga	-	-	102	29	7	-	43	-	-	1,2	
Gas	-	0	0	37	-	-	43	-	-	1,2	
Bahan baku tekstil (sutra, kapas, wol, dll)	195	305	237	195	153	110	43	(60,9)	(8,9)	1,2	
SENG	72	63	36	64	63	44	37	(16,5)	(2,5)	1,0	
Pulp	42	53	50	52	66	51	35	(31,2)	9,2	1,0	
PRODUK PEWARNA (Cat, Tinta, dll)	34	44	44	48	47	36	31	(12,6)	7,4	0,9	
Produk besi baja lainnya	147	140	147	86	71	53	30	(43,0)	(17,6)	0,8	
Subtotal 20 Komoditas/Produk	3.061	3.963	3.820	3.846	4.414	3.311	3.034	(8,4)	7,3	84,1	
Lainnya	1.038	1.214	1.478	1.192	1.234	902	575	(36,3)	3,3	15,9	

Gambar 1. Komoditas/Produk Utama Impor Indonesia dari Australia

Pada tabel ini, penulis berfokus kepada total impor Indonesia terhadap Australia pada tahun 2013 sampai tahun 2014 saja. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa produk gandum dan meslin masih menjadi produk yang paling diimpor setiap tahun namun dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan. Berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa Australia merupakan negara yang paling besar mengimpor gandum dan meslin bagi Indonesia.¹Tahun 2012-2017 Australia menguasai 50-60 % impor gandum dan meslin di Indonesia, ketergantungan Indonesia terhadap suplai gandum

¹ "Impor Biji Gandum Dan Meslin Menurut Negara Asal Utama Tahun 2010-2020," *Badan Pusat Statistik*, accessed July 2, 2022, <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2016/impor-biji-gandum-dan-meslin-menurut-negara-asal-utama-2010-2017.html>.

Australia tersebut memberikan ancaman kepada ketahanan pangan Indonesia jika tidak adanya hubungan kerja sama.

Perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia sehingga apabila hal ini diputuskan, maka akan mengganggu stabilitas perdagangan negara. Hal ini menjadi alasan dan kepentingan Indonesia dalam melakukan pemulihan hubungan bilateral negara. Sehingga akan rasional apabila Indonesia dan Australia pada akhirnya akan terus bekerja sama akan saling menguntungkan dua belah pihak. Di lain sisi, Indonesia akan mengalami kerugian jika menghentikan kerja sama perdagangan, seperti kelangkaan produk dan peningkatan harga yang terjadi secara signifikan.

Dorongan Kelompok Berkepentingan dalam Normalisasi Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia

Dari segi kelompok kepentingan Indonesia tidak memberikan pengaruh terhadap proses normalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Australia pascapenyadapan tahun 2013 karena proses normalisasi terlaksana dari segi pemerintah antar pemerintah. Presiden SBY sejak awal melakukan tiga langkah utama dalam merespons tindakan penyadapan Australia. Poin ketiga yaitu mengajukan pembentukan kode etik yang dirumuskan oleh masing-masing Menteri Luar Negeri Negara dan disahkan di depan presiden. Indonesia juga memberikan enam butir respon kelanjutan dari bentuk normalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang berfokus kepada antar pemerintah. Dari pemerintah Australia menyetujui hal tersebut sehingga terjadi penandatanganan kode etik yang disaksikan langsung oleh SBY.

Dorongan Sentimen Masyarakat

Dalam kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia, masyarakat menuntut adanya permintaan maaf dari Australia dan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Australia untuk Indonesia di Jakarta. Adanya aksi unjuk rasa tersebut mendorong pemerintah melakukan pemanggilan kepada perwakilan diplomatik Australia untuk meminta keterangan kepada Duta besar Australia, Greg Moriarty, terkait kasus

penyadapan. Meskipun permintaan maaf tersebut tidak terpenuhi oleh Australia dan mengecewakan Indonesia, namun aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung kepada keinginan masyarakat dalam memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia.

Dalam pelaksanaan normalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Australia, sentimen masyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong meskipun tidak terlalu signifikan karena tidak adanya suatu survei ataupun *polling* dalam kasus ini. Namun sebagai negara demokrasi, Indonesia memikirkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat atau opini publik, agar tindakan yang diambil dapat mencapai kepentingan bersama. Pemerintah menuruti sentimen masyarakat dengan memanggil duta besar Australia dan memberikan respon tegas terhadap penyadapan yang dilakukan Australia serta berujung kepada penandatanganan kode etik yang menandai kepulihan hubungan bilateral kedua negara.

Kasus penyadapan ini juga sebagai evaluasi bagi Indonesia, karena dengan fakta menyatakan bahwa aksi penyadapan sudah sering dilakukan negara lain, bahkan Australia sejak Indonesia berusia baru lima tahun sudah melakukan penyadap. Sebagai negara yang berdaulat Indonesia harus mengambil sikap tegas tetapi tepat dan terukur. Di lain sisi, bagi Lembaga Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat teknologi informasi di Indonesia bahwa kasus penyadapan ini harus menjadi pembelajaran agar dapat meningkatkan keamanan siber negara supaya tidak adanya aktivitas pencurian data berikutnya. Dengan adanya kasus penyadapan ini membuktikan kelemahan Indonesia dari segi keamanan siber negara, sehingga apabila dengan memutuskan hubungan diplomatik Indonesia bukanlah sebuah solusi. Seharusnya Indonesia melakukan introspeksi diri terkait keamanan siber.

Kesimpulan

Indikator yang menjadi faktor utama proses normalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Australia pascapenyadapan tahun 2013 adalah kepentingan ekonomi yang mana Australia merupakan salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia, selama bekerja sama dengan Australia terdapat banyak keuntungan yang diraih oleh Indonesia, dari neraca perdagangan menunjukkan bahwa laju total impor Indonesia dari Australia lebih tinggi dari total ekspor ke Australia setiap tahun. Dengan tingkat impor yang tinggi tersebut Indonesia mengalami ketergantungan impor beberapa komoditas seperti gandum dan sapi, serta untuk menjaga ketahanan pangan. Indonesia dan Australia juga tergabung dalam FTA yang memberikan keuntungan bagi Indonesia seperti pengurangan bea cukai, dan ekspor-impor yang baik, Selain itu, Indonesia akan mengalami kerugian karena Australia merupakan donator banyak produk di Indonesia, jika dihentikan maka akan mengalami kenaikan harga yang signifikan di Indonesia, kelangkaan produk, kekurangan lapangan kerja karena pemberhentian karyawan, dan kontrol pasar yang lemah karena lonjakan harga yang tinggi. Sehingga dengan banyaknya kepentingan Indonesia terhadap Australia, ketergantungan kedua negara, persetujuan kode etik, dan keuntungan kedua belah pihak, Indonesia melakukan proses normalisasi hubungan bilateral dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013.

Daftar Pustaka

Ball, Desmond, and Helen Wilson, eds. *Strange Neighbours: The Australia-Indonesia Relationship. Pacific Affairs*. 1st ed. Vol. 66. North Sydney: Allen & Unwin Australia, 1991.

Barston, R.P. *Modern Diplomacy*. Fourth. London: Routledge, 2014. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315832890/modern-diplomacy-barston>.

Dugis, Vinsensio MA. "Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia." *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 2 (2017): 309–324.

Dupont, Alan. "The Security Agreement What the Security Agreement." *Australian Quarterly* 68, no. 2 (1996): 49–62.

Karunaratne, Neil Dias. "Prospects for Stronger Australia-Indonesia Economic

Ties.” *Asian Survey* 22, no. 3 (1982): 292–303.